

## LAPORAN NOTULA

### *Rapat Pembahasan Usulan Komitmen RAN OGI VII 2023 – 2024: Isu Strategis Anti Korupsi-Anggaran*

Kamis, 27 Oktober 2022 – Pukul: 10.00 – 12.00

#### **PESERTA**

##### **Kementerian/Lembaga:**

- Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Politik dan Komunikasi, Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Bagian Monitoring dan Evaluasi)

##### **Organisasi Masyarakat Sipil:**

- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Transparency International Indonesia (TII)

#### **TUJUAN**

Rapat pembahasan usulan komitmen untuk RAN OGI VII 2023 – 2024 kelompok isu strategis anti korupsi dan anggaran ini bertujuan untuk:

1. Membahas usulan komitmen yang diusulkan oleh Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia;
2. Mendiskusikan tanggapan K/L terkait usulan komitmen dan potensi kerja sama di dalam RAN OGI VII 2023 – 2024;
3. Menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan rapat lanjutan dengan agenda pembahasan matriks target capaian.

#### **PEMBAHASAN**

1. **Armita** selaku perwakilan dari Open Government Indonesia menyampaikan paparan dan pembukaan sebagai berikut:
  - *Open Government Indonesia* merupakan bentuk inisiatif pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik *Open Government Partnership* (OGP) yang dimulai sejak 2011, untuk mempromosikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif;
  - Sekretariat Nasional OGI dibentuk untuk memfasilitas pencapaian RAN OGI lewat koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - Telah terdapat 6 Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (RAN OGI) sejak tahun 2011 – 2022 saat ini dimana setiap periode RAN tersebut memiliki berbagai macam bentuk fokus isu dengan banyak poin-poin komitmen. Pada RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 telah dipetakan 6 isu strategis yakni: 1) anti korupsi dan anggaran; 2) ruang kewargaan dan demokrasi; 3) pelayanan publik yang inklusif; 4) akses keadilan; 5) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI); 6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam;
  - Peta kerja rancangan penyusunan RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 dimulai dari pengajuan usulan komitmen RAN OGI oleh OMS dan K/L yang kemudian dilakukan penelaahan usulan komitmen. Setelahnya, akan ada diskusi dengan direktorat bappenas terkait dan dilanjutkan dengan diskusi komitmen terpilih dengan K/L terkait, di akhir akan ada finalisasi RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 yang ditargetkan akan selesai di pertengahan bulan Desember;
2. **Ibu Tari** selaku perwakilan dari Indonesia Corruption Watch menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
  - Hal yang sudah dilakukan oleh OMS dalam mengatasi permasalahan yang teridentifikasi ialah pembuatan kajian yang digunakan sebagai pedoman dalam

mendorong lahirnya Perki Standar Layanan Informasi Publik dimana salah satu pasalnya menjelaskan secara rinci informasi pengadaan barang dan jasa yang harus dibuka oleh Badan Publik;

- ICW dan TI sudah memetakan sejauh mana peran yang akan didorong LKPP dan KIP dan sejauh mana anggaran OMS akan dipakai untuk realisasi usulan komitmen;
  - Usulan komitmen pertama ialah mendorong LKPP untuk mempublikasi transaksi K/L/Pemda di e-katalog, karena yang saat ini tersedia hanya komoditasnya bukan transaksinya seperti di tender;
  - Kedua, mendorong ditambahkan publikasi informasi pengadaan darurat di LKPP karena sejauh ini hanya ada besaran anggaran dan K/L/PD yang melakukan transaksi, mendorong juga Perlem PBJ Darurat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, dan Kemendagri diharap dapat mengeluarkan SE yang meminta seluruh Pemda melengkapi informasi PBJ daruratnya (bisa berupa SE dari Kemendagri ataupun SKB dari LKPP dan Kemendagri);
  - Ketiga, mendorong efektivitas e-pengaduan dengan mengembangkan API terbuka agar sistem terintegrasi ke sistem lain misal ke opentender.net dan mengintegrasikan inspektorat dalam sistem e-pengaduan karena inspektorat di K/L/Pemda belum memiliki akses di sistem hanya dikirimkan surat atau dokumen dari hasil telaah LKPP;
  - Keempat mendorong pengembangan databasae SIKAP dengan menyediakan data rekaman kinerja penyedia, menambahkan daftar riwayat daftar hitam, dan menambahkan informasi data BO;
  - Kelima, mendorong pelibatan UMKM dengan pelatihan untuk UMKM dan terselenggaranya audit sosial tentang kemudahan UMKM dalam pelibatan pengadaan pemerintah;
  - Keenam, penguatan peran masyarakat untuk pengawasan PBJ melalui training PBJ untuk CSO dan jurnalis serta penyusunan modul PBJ bagi CSO dan modul pengawasan PBJ;
  - Ketujuh, mendorong sistem pengadaan elektronik dengan terpublikasinya informasi dan dokumen barang dan jasa pemerintah sesuai Perki 1/2021 dan tersedianya koede unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu program;
  - Kedelapan, mendorong implementasi Perkislip dengan melakukan uji akses keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan memasukan poin keterbukaan barang dan jasa di dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan KIP.
3. **Bapak Agus** selaku perwakilan dari Transparency International Indonesia menyampaikan paparan sebagai berikut:
- SE antara LKPP dan Kemendagri untuk bisa mendorong Pemda mempublikasi pengadaan barang dan jasa darurat, dengan transparannya pengadaan barang dan jasa tersebut maka masyarakat bisa dengan mudah melakukan pemantauan;
  - Saat ini pembelanjaan oleh masing-masing K/L/Pemda publikasi transaksi di e-katalog memang sudah dibuka tetapi rincian transaksinya belum bisa di monitor oleh publik;
4. **Bapak Rangga** selaku perwakilan dari LKPP menyampaikan tanggapan dan masukan sebagai berikut:
- Tujuan LKPP dalam e-katalog adalah meningkatkan partisipasi dari Usaha Menengah Kecil dan Koperasi (UMKK) hal ini untuk meningkatkan perekonomian secara keseluruhan dan meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN);
  - LKPP sedang melakukan revisi renstra untuk memperkuat UMKK dan meningkatkan penggunaan PDN;
  - Kesepakatan informasi e-katalog yang akan dipublikasikan dalam output yang diharapkan pada nomor 1 perlu dielaborasi lebih lanjut dan pembagian tugas antara LKPP dan Kemendagri dalam mendorong efektivitas kanal complaint handling juga perlu dielaborasi;
  - Diharapkan kajian terkait yang sudah dilakukan oleh ICW dan TII dapat dishare kepada LKPP sebagai informasi tambahan nantinya;

5. **Ibu Tari, Bapak Agus, dan Bapak Kes** selaku perwakilan dari ICW dan TII menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Objektif yang dituju selain adanya kesepakatan ialah ada lebih banyaknya informasi yang dibuka di kanal dashboard pengadaan darurat, seperti antara lain jenis pengadaannya apa, jumlah yang dibeli berapa, penyedia siapa, statusnya bagaimana, apakah penyedia masuk ke dalam UMKK atau belum, histori negosiasi. Kesepakatan lebih lanjut diharapkan bisa disetujui dalam diskusi dengan LKPP apabila nantinya diminta untuk perlu diperinci terlebih dahulu maka akan diperinci apa saja yang ingin dibuka;
  - Kanal pengadaan darurat belum ada K/L/Pemda yang menginput diharapkan nanti stakeholders yang bertanggung jawab bisa mengeluarkan surat edaran agar K/L/Pemda melakukan input pengadaan barang jasa daruratnya;
  - Pemilihan daerah NTT, Sulsel, DKI Jakarta, Sumut karena menjadi fokus daerah ICW dan TII;
  - Terkait kode unik di poin nomor 7 diharapkan ada identifier untuk komponen-komponen pelaksanaan proyek jadi jika disatukan misal antara pengawas, konsultan perencana, dan tender itu bisa ada di dalam satu gambaran besar karena selama ini terpisah-pisah dan keywordnya berbeda-beda. Jika berbeda-beda suatu proyek pembangunan tidak bisa teridentifikasi jumlah keseluruhan pengadaan menjadi berapa;
  - Inspektorat K/L/Pemda diharapkan bisa memiliki akun dan memiliki akses di dalam e-pengaduan.
6. **Ibu Dita** selaku perwakilan dari LKPP menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- LKPP sudah mengeluarkan SE untuk pencatatan pengadaan darurat pada tahun 2020;
  - Saat ini LKPP sedang bekerja sama dengan Kumham terkait data BO yang rencananya di tahun 2022 akan terintegrasi, apabila tidak didaftarkan di dalam Kumham pendataan terkait BO bisa ditambahkan di SIKAP;
  - Poin nomor 7 untuk mendorong SPSE di keterbukaan pengadaan, penyediaan kode unik untuk penyatuan pekerjaan dan beberapa poin lain perlu diskusi internal dengan para pimpinan;
  - Mengenai kode unik dari diskusi singkat dengan tim teknis masih memungkinkan asal requirement yang ingin ditampilkan jelas (contoh merupakan satu proyek keseluruhan). OMS dapat terlibat dalam proses rapat teknis untuk penampilan di dashboard jika hal ini jadi didorong di dalam RAN;
  - Pencatatan pengadaan darurat yang masih berupa draft padahal sudah selesai dilaksanakan bisa jadi memang penginputan ke websitenya yang belum selesai dilaksanakan atau mungkin proses sudah selesai tetapi barang belum diterima;
7. **Bapak Rangga** selaku perwakilan dari LKPP menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Ranah yang memiliki tanggung jawab untuk inspektorat ialah BPKP, tetapi belum bisa terbayangkan bagaimana peran BPKP di dalamnya apakah pembuatan surat edaran atau mengubah peraturan mengenai tindak lanjut pengaduan karena di dalam Perpres pengadaan mengenai pengaduan barang dan jasa detailnya tidak ada di dalam Perpres;
  - Perlu ditambahkan Pusdiklat, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional.

**DOKUMENTASI**

